

**IMPLEMENTASI PROGRAM RASKIN (BERAS MISKIN) DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA  
KEMBUAN KECAMATAN TONDANO UTARA**

*Dwi Fitri Apriani*  
[dwifitriapriany@gmail.com](mailto:dwifitriapriany@gmail.com)

**ABSTARCT**

*An Overview About the Program Implementation Raskin (Rice Poor) In Efforts to Improve Welfare of the Poor in Kembuan village Tondano northern districts. Raskin (Rice Poor) is one of the government programs to help the poor and food-insecure, so they get the rice for household needs. However, upon the implementation of these policies may not run as expected because there are several factors that affect delays in the implementation of the community that is the economic factor RTSPM in Kembuan village Tondano northern districts. And the success of the program Raskin (Rice Poor) measured by the level of achievement of indicators 6 Right is Target, right amount, right price, right time, right quality and right administration. The purpose of this study is to find out how the implementation of the program Raskin (Rice Poor) in an effort to improve the welfare of the Poor in Kembuan village Tondano northern districts. This study is based on the theory of Marilee S. Grindle, where according to Grindle in theory to measure the success of its implementation that the implementation should be seen from the process, where this theory would look at and examine how the implementation process Raskin (Rice Poor) in Kembuan village Tondano northern districts. The method used in this study is a qualitative approach. Instrument researchers are researchers themselves. Data collection techniques by observation, interviews and document research. The results in this study is based on interviews with informants research program Raskin (Rice Poor) Such implementations are not fit for purpose and do not work as expected.*

**Keywords:** *Rice poor, Kembuan Village, welfare*

**PENDAHULUAN**

Raskin adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan rawan pangan, agar

mereka mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Program Raskin (Beras Miskin) tersebut merupakan salah satu program

penanggulangan kemiskinan termasuk dalam Kluster I tentang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Instruksi presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang kebijakan perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan serta stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin (RTM) di samping itu program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun daerah yang penting dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Program Raskin (Beras Miskin) dapat dicapai melalui koordinasi antara instansi/lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat.

Tidak seluruh masyarakat Indonesia berhak atas Raskin (Beras Miskin), hanya mereka yang tergolong miskin dan rawan pangan di daerah tertentu mendapat hak untuk menerima Raskin (Beras Raskin). Jumlah beras yang diberikan kepada setiap keluarga yaitu 15 kg beras setiap bulan dengan harga Rp. 1600/kg. harga tersebut adalah harga di titik distribusi. Biaya dari titik distribusi ketempat masing-masingdi tanggung oleh masing-masing penerima. Raskin (Beras Miskin) dibagikan setiap bulan di titik distribusi, waktu pengambilan setiap bulan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Titik distribusi yaitu lokasi yang disepakati yang diusahakan dekat dengan penerima. Lokasi tersebut adalah di kelurahan atau di Balai Desa. Raskin (Beras Miskin) dibagikan oleh petugas yang ditunjuk di titik distribusi yang bersangkutan. Penanggung jawab Raskin (Beras Miskin) di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa atau Lurah. Raskin berasal dari gudang Dolog/sub Dolog, beras tersebut diangkut dari gudang oleh Satgas Raskin ke setiap titik distribusi. Satgas Raskin (Beras Miskin) terdiri dari petugas Dolog/sub Dolog/petugas Pemda atau yang ditunjuk. Dari hasil

penelitian awal, kebijakan raskin belum berjalan sesuai dengan sasaran program. Pada kenyataannya implementasi kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur kebijakan karena tergantung pada kondisi dan situasi masyarakat setempat. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada Pedoman Umum Raskin. Penyimpangan yang terjadi yaitu tidak tepatnya jumlah beras yang diperoleh para Rumah Tangga Miskin (RTM), yang seharusnya berdasarkan pedoman umum raskin setiap RTM menerima beras sejumlah 15 kg tetapi masyarakat memperoleh kurang dari 5 kg per RTM/RTS per bulannya. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana mengenai implementasi program raskin (beras miskin) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara.

2. Untuk mengetahui masalah-masalah dalam implementasi program raskin (beras miskin) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara.

## **TEORI**

Implementasi kebijakan terdapat fenomena-fenomena implelementasi kebijakan publik, yaitu: (dalam Nugroho, 2011: 648-652)

1. Ketepatan Kebijakan Sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah how excelent is the policy.
2. Ketepatan Pelaksana Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah/masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out
3. Ketepatan Target Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.
4. Ketepatan Lingkungan a. Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. b. Lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Callista sebagai variabel eksogen.

5. Ketepatan Proses Secara umum, implementasi kebijakan publik terdiri atas 3 proses, yaitu:
  - a. Policy acceptance. Disini publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan
  - b. Policy adoption. Disini publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan
  - c. Strategic readiness. Disini publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan.
6. Ketepatan Tujuan Ketepatan tujuan dinilai dari kesesuaiannya pelaksanaan kebijakan dengan tujuan awal dimana kebijakan tersebut dibuat. Tujuan ini juga dapat dinilai efektif atau efisien sesuai dengan pelaksanaannya dilapangan.
7. Konsistensi Tahapan atau prosedur ini tidak bisa berubah-ubah karena tahapan ini bersifat kaku dan konsisten.

Keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. (dalam Subarsono. 2005: 89-101) 1. Teori George C. Edwards III (1980) Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- a. Komunikasi Diperlukan adanya komunikasi yang baik dari setiap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan ini.
- b. Sumberdaya Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur dalam kehidupan. Sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial
- c. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor.
- d. Struktur Birokrasi Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP).

## **METODE PENELITIAN**

1. Desain Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status variabel, gejala, atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

2. Situs Penelitian yang penulis lakukan, mengambil di Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara. Dengan berbagai pertimbangan bahwa dalam pengelolaan RASKIN di tiap-tiap Desa bisa berbeda.
3. Subjek Penelitian Penentuan informan yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dimana penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti, dengan mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisis dalam penelitian ini.
4. Jenis Data Karena peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teks atau tulisan, kata-kata tertulis, tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.
5. Sumber Data Data primer adalah data yang bersal dari sumber data utama yang berupa tindakan-tindakan sosial dan katakata dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, koran, majalah, internet serta dokumendokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian
6. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakapcakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.
7. Analisis dan Interpretasi Data Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain (Sugiyono, 2010 : 256) dilakukan oleh memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti.
8. Kualitas Data Cara yang dapat dilakukan antara lain: Melakukan wawancara mendalam kepada informan. Melakukan uji silang antara informasi yang diperoleh dari informan dengan hasil observasi di lapangan. Mengkonfirmasi hasil yang diperoleh kepada informan dan sumber-sumber lain.

**HASIL PENELITIAN**  
Implementasi Kebijakan

1. Ketepatan Kebijakan Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Pertanyaannya adalah how excellent is the policy. (dalam Nugroho, 2011:650).

1. Intensitas Tujuan Menurut pedoman umum raskin didalam pelaksanaan program Raskin, Tujuan dari program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok bentuk beras. Selain itu raskin juga bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Hasil interview yang dilakukan oleh Peneliti dapat diketahui bahwa tujuan dari program Raskin dinilai belum tepat. Karena sasaran yang menjadi tujuan tidak sepenuhnya mendapatkan beras dengan jumlah yang ditentukan. Rumah Tangga Sasaran yang seharusnya mendapatkan beras 15kg/KK kenyataannya hanya mendapatkan beras kurang dari 10Kg/KK. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketepatan kebijakan dalam program raskin,

belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dari pedoman umum raskin.

## 2. Ketepatan Pelaksanaan

1. Ketepatan Aktor Pelaksana Aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah/masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (privatization atau contracting out) (dalam Nugroho, 2011:650). Dalam Pedoman Umum Raskin telah dijelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam melaksanakan program ini. Dalam Pedoman Umum Raskin agar mencapai tujuan yang telah ditentukan dibentuk Tim Koordinasi di setiap Kota, Kecamatan maupun Kelurahan Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa tim pelaksana Program Raskin sudah dibentuk sesuai dengan tingkatannya. Tim Kelurahan juga sudah memilih atau menunjuk masyarakat untuk menjadi koordinator di RW nya masing-masing. Pemilihan koordinator RW berdasarkan hasil kesepakatan dari Kelurahan.

2. Ketepatan Tugas Pelaksana Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa tim

pelaksana Program Raskin sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas-tugas yang ditentukan oleh pedoman umum raskin. Seperti tim kabupaten / kota, tim kecamatan dan tim kelurahan sudah menjalankan tugasnya dalam pengimplementasian program raskin. Tim pelaksana raskin di kabupaten / kota, kecamatan dan kelurahan, sudah melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan, melakukan penyaluran hingga titik distribusi dengan baik atau sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Keterlibatan para tim pelaksana raskin kota, kecamatan dan kelurahan memudahkan berjalannya program raskin di Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara. Para aktor yang terlibat juga sudah mengetahui dan sudah memahami tugas masing-masing. Sehingga implementasi program raskin yang berjalan di Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara bisa dikatakan berhasil.

### 3. Ketepatan Target 1. Ketepatan Target Penerima Pada tahun 2013 pemerintah menerapkan kebijakan baru dalam sistem pendataan RTS

yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Program raskin termasuk dalam klaster 1 yaitu kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. Tujuannya untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan. (dalam <http://tnp2k.go.id/program/klaster-i-2/>) Dalam ketepatan target peneliti lebih memilih permasalahan pada ketepatan target yang mencakup dalam apakah penerima target ini sudah mengetahui ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan program raskin. Pada kenyataannya ketepatan target yang terjadi di Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara belum berjalan sesuai dengan pedoman umum raskin. Sebab masyarakat Kecamatan Tondano Utara yang tidak termasuk dalam data RTS merasa berhak mendapatkan raskin juga. Sehingga yang menjadi tujuan dari program

raskin tidak bisa tercapai sepenuhnya.

#### 4. Ketepatan Proses

1. Kesiapan Pelaksana dalam Menjalankan Kebijakan Menurut pedoman umum raskin, program raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas strategis dan n program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementrian/lembaga terkait baik pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawan dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing. Pemerintah pusat berperan dalam pembuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat bergantung kepada pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program raskin, yang diwujudkan dalam 6 (enam) tepat. Dalam hal ini tim pelaksana program raskin di tingkat Kota, Kecamatan dan kelurahan menyatakan bahwa siap menjalankan program raskin yang diberikan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus melaksanakan program raskin sesuai

dengan pedoman umum untuk mencapai tujuan dari program raskin dan memenuhi indikator 6 (enam) tepat yang menjadi tolak ukur keberhasilan program raskin.

2. Kesiapan masyarakat dalam Menjalankan Kebijakan Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. ([http://tnp2k.go.id/program/kl\\_aster-i-2/](http://tnp2k.go.id/program/kl_aster-i-2/)) Tujuan dan sasaran dari program raskin untuk Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara tidak dipatuhi oleh masyarakat setempat. Maka dari itu terjadi ketidaksiapan masyarakat dalam menjalankan program raskin. Selain itu bisa dilihat dari masyarakat yang bukan RTS tetapi ingin mendapatkan raskin juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa program raskin di Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara masyarakatnya belum siap menjalankan program raskin.



Faktor – faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Raskin Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara 1. Komunikasi Peneliti membahas fenomena komunikasi dengan memperhatikan transmisi, kejelasan dan konsistensi yang disesuaikan dengan hasil penelitian yaitu sebagai berikut : 1. Transmisi dari aparatur kepada penerima/pelaksana program Raskin Transmisi komunikasi atau penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Langkah awal dalam penyampaian informasi ini merupakan langkah penting agar pelaksana ataupun penerima mengetahui isi dari Program Raskin. Transmisi dalam program raskin disampaikan dengan cara sosialisasi. Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat kita ketahui bahwa telah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh para tim pelaksana Program Raskin. Sosialisasi dilakukan sampai ke titik distribusi dan rumah tangga sasaran. Sehingga diharapkan sampai ke rumah tangga sasaran memahami isi dari Program raskin yang dijalankan. 2. Kejelasan akan kebijakan / program raskin George Edwards III (Agustino, 2006 : 150) menyatakan kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana haruslah jelas dan tidak

membingungkan masyarakat. Ketidakjelasan program tidak selalu menghalangi implementasi pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan interview yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa kendala dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara sehingga mengakibatkan pemahaman tentang program raskin sangat kurang. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang informasi program raskin.

3. Konsistensi Berdasarkan hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat kita ketahui bahwa informasi yang diberikan oleh atasan sudah konsisten. Jika ada informasi yang baru, langsung disampaikan kepada koordinator yang bersangkutan. Kemudian koordinator menyampaikan lagi hingga informasi tersebut sampai ke rumah tangga sasaran. 2. Sikap (Disposisi) 1. Penerimaan masyarakat terhadap implementasi program Raskin Masyarakat yang tergolong masyarakat sangat miskin menjadi kelompok sasaran (target group) dalam Implementasi Program Raskin. Berdasarkan hasil interview yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa penerima manfaat raskin di

Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara merasa senang dengan adanya program raskin. Sehingga manfaat dari beras raskin dapat dirasakan oleh masyarakat. 2. Kepuasan terhadap Penggunaan Raskin Indikator keberhasilan program raskin ada 6 tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat kualitas. Hasil interview yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa penerima raskin merasa kurang puas dikarenakan masih ada kekurangan dalam pelaksanaan program raskin. Program raskin yang berjalan di Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara belum tepat kualitas, tidak tepat sasaran dan tidak tepat jumlah.

3. Ketersediaan dalam pembayaran raskin. Menurut peraturan didalam Pedoman Umum Raskin pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di Titik Distribusi. Kemudian uang HTR yang diterima pelaksana distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat oleh pelaksana distribusi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan

kondisi setempat atau diserahkan kepada Perum BULOG setempat. Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa masyarakat mendukung program raskin dengan kesediaannya membayar beras raskin sesuai dengan kesepakatan RW. Walaupun harga dan jumlah tidak sesuai dengan pedoman umum raskin. 3. Sumber Daya 1. Staf Staf adalah dalam sebuah era dimana “pemerintah besar” berada dalam serangan dari semua arahan, hal ini mungkin nampak mengejutkan untuk belajar bahwa sebuah sumber pokok kegagalan implementasi adalah staf yang tidak cukup (dalam Tangkilisan, 2003:56). Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia yang dimiliki oleh tim pelaksana masing-masing tingkat sudah memadai. Apalagi dengan adanya bantuan dari tim koordinator dari RW setempat. Hal ini bisa mempermudah pelaksanaan program raskin di Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara. 2. Kesiediaan fasilitas Seorang implementor mungkin memiliki staf cukup, mungkin memahami apa yang ia duga harus dikerjakan, mungkin memiliki otoritas untuk

mengamalkan tugasnya, namun tanpa bangunan perlu, peralatan, persediaan, dan bahkan implementasi ruang hijau tidak akan berhasil (dalam Tangkilisan, 2003:83). Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan program raskin dinilai sudah memadai.

## **PENUTUP**

### 1. Saran

Dalam pelaksanaan implementasi program raskin yang belum optimal, penulis menyumbangkan saran sebagai berikut: Implementasi Kebijakan

1. Ketepatan Kebijakan Dalam ketepatan kebijakan peneliti memberi saran bahwa perlu diadakannya pendataan ulang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi rumah tangga, termasuk struktur demografi dan karakteristik rumah tangga. Hasil pendataan selanjutnya dipergunakan sebagai informasi dasar untuk melakukan analisis guna memisahkan penduduk miskin dengan penduduk bukan miskin. Agar tujuan dan sasaran dari program berjalan sesuai dengan tujuan.
2. Ketepatan Target Ketepatan target belum berhasil dilaksanakan di Desa Kembuan Kecamatan Tondano

Utara. Penulis memberi saran agar pemerintah membuat kartu peserta raskin. Dengan adanya kartu peserta raskin, masyarakat yang tidak memiliki kartu tidak diperbolehkan membeli beras raskin. Faktor yang menghambat program Raskin didesa Kembuan Kecamatan Tondano Utara adalah:

- a. Faktor ekonomi masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) didesa Kembuan masih rendah, RTSPM tersebut berasal dari kalangan bawah.
- b. Sistem kolektif yang belum maksimal.
- c. Biaya operasional Raskin (beras miskin) belum maksimal dan ditemukannya beras Raskin dengan kualitas rendah.
- d. Masih ditemukannya beras miskin (Raskin) dengan kualitas rendah, beras Raskin tersebut berbau apek, berwarna kuning dan berketu.
- e. Sumber daya aparatur didesa Kembuan belum maksimal
- f. Fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program Raskin (beras miskin) masih lemah.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Undang-undang No. 32 tahun 2004.  
Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No. 7 tahun 1996.  
Tentang Pangan.

- Peraturan Presiden RI No. 13 tahun 2009. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Intruksi Presiden No. 8 tahun 2008. Tentang Kebijakan Perberasan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2002. Tentang Ketahanan Pangan
- Keputusan Menko Kesra No. 35 tahun 2008. Tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Abdul Wahab, Solihin. 2005. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, Irfan. 2007, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2001. “Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara”. Jakarta; Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, AbdulKahar dan Teguh Yuwono. 2002. “Kebijakan Publik (Konsep dan Strategi)”. Semarang; Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
- Agustino, Leo. 2006. Politik dan Kebijakan Publik. Bandung : Aldi Bandung-Pusat KPEW Lemit UNPAD.  
<http://tnp2k.go.id/program/klaster-i2/>